

ANALISIS MANFAAT BASIS AKRUAL DAN BASIS KAS MENUJU AKRUAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris Pada SKPD di Kota Solok)

Inessa trihani

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : inessathani10@gmail.com / 082169096895

ABSTRAK

This research aimed to identify the difference in perceptions about the benefits of accrual basis and cash base towards accrual in the internal decision making. This type of research is comparative studies with a total of 156 samples of respondents. A classic assumption test in use include a test of normality, test its homogeneity. Test the hypothesis on this research using a T-Test different trials. The results of the research indicates that: (1) accrual Basis is more beneficial than the cash basis towards accrual in the internal decision-making of local government in the city of Solok(2) there is a difference in accrual basis and cash base towards accrual in the internal decision making area.

Keywords: Accrual Basis, Accrual Basis Towards Accrual, Accounting Basis, Internal Decision Making

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan persepsi tentang manfaat basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal. Jenis Penelitian ini adalah penelitian komparatif jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 39 SKPD yang ada di Kota Solok terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan inspektorat dengan total jumlah sampel 156 responden. Uji asumsi klasik yang di pakai meliputi uji normalitas, Uji Homogenitas. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji beda T-Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah di kota Solok (2) Terdapat perbedaan basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal daerah.

Kata kunci: Basis Akrua, Basis Kas Menuju Akrua, Basis Akuntansi, Pengambilan Keputusan Internal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan standar akuntansi khususnya sektor publik terus berkembang, hal yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP). Salah satu bentuk perkembangan akuntansi sektor publik adalah pada tahun 2004 di Indonesia masih menggunakan sistem pencatatan *single-entry*. Sistem *double-entry* baru diterapkan pada 2005 seiring dengan terbitnya paket undang-undang keuangan negara yaitu UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, dan UU No 15 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (selanjutnya disebut SAP) berbasis kas menuju akrual

SAP bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan pemerintah 71 Tahun 2010 manfaat kas menuju akrual adalah menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, menyediakan informasi mengenai jumlah

sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, dan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

Menurut Simanjuntak (2005) basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang dikembangkan di Indonesia sebagai transisi menuju basis akrual penuh, dengan cara menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Kemenkeu (2014) dalam modulnya menyebutkan bahwa basis kas menuju akrual merupakan suatu pendekatan unik yang dikembangkan oleh Indonesia untuk dapat menyajikan empat laporan keuangan pokok yang diamanatkan UUKN dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Menurut Erlina (2015) Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (PP No. 24 tahun 2005).

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Study Nomor 14 IFAC *Public Sector Committee* (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual pada sektor pemerintahan dipandang sebagai bagian

dari agenda *New Public Management* yang dirancang untuk mencapai kondisi operasi yang lebih menyerupai bisnis dan kinerja yang berfokus pada sektor publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi basis akuntansi mana (basis akrual atau basis kas menuju akrual) yang menurut para manajer sektor publik dan pengelola keuangan daerah dapat memberikan informasi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan internal di pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian uji beda antara basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan pemerintah internal di OPD kota Solok. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi basis akuntansi mana yang lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Manfaat Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manfaat basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah.
2. Apakah terdapat perbedaan manfaat basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah.

Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

1. Teori Institusional

Teori institusional sangat erat kaitannya dengan sebuah lingkungan suatu organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Carruthers (1995) bahwa paham *new institutionalism* menggambarkan tentang struktur dari suatu

organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana dia berada. Jadi, jika berbicara mengenai teori institusional, pasti berbicara juga mengenai bagaimana cara suatu organisasi tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Menurut DiMaggio dan Powell (1983), *isomorphism* adalah suatu proses yang memberikan batasan atau memaksa suatu organisasi agar menyerupai dengan organisasi yang lain dalam kondisi lingkungan yang sama. Akan tetapi, terkadang *isomorphism* tersebut akan memberikan tekanan institusional pada organisasi, karena mereka harus melakukan perubahan yang sama (homogenitas) merasa harus kerja keras untuk menjadi sama tersebut.

Terdapat 3 (tiga) macam bentuk *isomorphism*, yakni (1) *Mimetic Isomorphism* (2) *Coercive Isomorphism* (3) *Normative Isomorphism*. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori institusional yang menggambarkan dalam peraturan mengenai penerapan SAP berbasis akrual ini, telah terlihat secara jelas tentang bagaimana proses *coercive isomorphism* berusaha dengan keras untuk mengetahui bagaimana SAP akrual ini dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Coercive Isomorphism* mengindikasikan bahwa mereka melakukan SAP berbasis akrual ini semata-mata karena sudah adanya perintah dari organisasi di atasnya, yang dalam hal ini pemerintah pusat bahwa mereka harus menjalankan SAP basis akrual ini paling lambat tahun 2015 ini.

Adapun untuk mencapai institusionalisasi ini, mereka akan berusaha untuk menjadi mirip (*isomorphism*) yang ditunjukkan dengan cara *coercive isomorphism* yakni tekanan dari organisasi yang ada di atasnya, yang memiliki kewenangan lebih besar. *coercive isomorphism* juga merupakan tipe *isomorphism* utama yang terjadi karena adanya faktor pendorong dalam bentuk desakan dan aturan - aturan hukum yang

mengikat organisasi pemerintah tersebut yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan pilihan teknik pencatatan akuntansi yang berpengaruh besar terhadap informasi keuangan yang dihasilkan oleh setiap organisasi termasuk instansi pemerintahan, pilihan basis akuntansi menentukan kapan dampak keuangan suatu transaksi atau kejadian diakui untuk tujuan laporan keuangan. Menurut PP 71 tahun 2010 basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Menurut Erlina (2015) Basis akuntansi dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual dan akuntansi berbasis akrual.

a. Basis Kas

Basis kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain akuntansi kas basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Kas basis akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima misalkan perusahaan menjual produknya akan tetapi uang pembayaran belum diterima maka pencatatan pendapatan penjualan produk tersebut tidak dilakukan, jika kas telah diterima maka transaksi tersebut baru akan dicatat seperti halnya dengan "dasar akrual" hal ini berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan, kedua teknik tersebut akan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan, jika

menggunakan dasar akrual maka penjualan produk perusahaan yang dilakukan secara kredit akan menambah piutang dagang sehingga berpengaruh pada besarnya piutang dagang sebaliknya jika yang dipakai cash basis maka piutang dagang akan dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi

Definisi akuntansi berbasis kas (*cash based accounting*) menurut Erlina, Omar sp dan Rasdianto (2015,11) Akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PSAP No. 1 paragraf 8). Fokus Pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Ruang lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi berbasis kas adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggung jawaban manajemen atas aset dan kewajiban. Menurut

Mardiasmo (2002) Pada penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan dari cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang riil, aktual, dan objektif. Namun, GAAP tidak membenarkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program, dan aktivitas tidak dapat diukur dengan baik.

b. Basis Kas Menuju Akrual

Erlina, Omar dan Rasdianto (2015,11) Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan Basis ini pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (PP No.24 tahun 2005)

SAP berbasis kas menuju akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi

dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. PSAP dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam rangka SAP berbasis kas menuju akrual tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP berbasis kas menuju akrual digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Manfaat basis kas menuju akrual berdasarkan Lampiran II PP 71 Tahun 2010 adalah : (1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. (2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

Menurut Simanjuntak (2005) basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang dikembangkan di Indonesia sebagai transisi menuju basis akrual penuh, dengan cara menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas

dalam Neraca. Kemenkeu (2014) dalam modulnya menyebutkan bahwa basis kas menuju akrual merupakan suatu pendekatan unik yang dikembangkan oleh Indonesia untuk dapat menyajikan empat laporan keuangan pokok yang diamanatkan UUKN dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Menurut Erlina (2015) Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual (PP No. 24 tahun 2005).

c. Basis Akrual

Perubahan basis akuntansi dari *cash toward accrual* ke basis akrual pada entitas pemerintahan di Indonesia merupakan bentuk reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baik sebagaimana yang diamanahkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). SAP akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang mengacu pada *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS)*.

Manfaat laporan keuangan berbasis akrual adalah (PP 71 tahun 2010) adalah (a) penyajian informasi keuangan yang lebih informatif, terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi terkait. (b) memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan; dan (c) mengikuti *international best practices* dari negara-negara lain dan memenuhi amanat UU bidang Keuangan Negara.

Tudor dan Mutiu, (2006) berpendapat serupa mengenai definisi basis

akrual yaitu pada basis akrual transaksi dicatat pada saat pemesanan dilaksanakan, terdapat penyerahan barang, atau jasa telah diberikan tanpa memperhatikan apakah kas (atau piutang) sudah benar-benar diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan, dan beban dicatat pada saat menerima barang atau jasa. Laughlin (2012) mendefinisikan akuntansi akrual adalah metode pencatatan transaksi yang tidak hanya dilakukan pada saat kas yang diterima atau dibayarkan dengan kas tetapi penerimaan dan pembayaran yang ditangguhkan, yang akan diterima atau dibayarkan dengan kas pada masa mendatang dapat dicatat dan seharusnya dicatat.

3. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik.

Menurut PP 71 tahun 2010 Pelaporan keuangan pemerintahan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman

- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Mardiasmo (2002) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut :

- a. Kepatuhan dan pengelolaan (Compliance and stewardship)
- b. Akuntabilitas dan pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting)
- c. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning and authorization information)
- d. Kelangsungan organisasi (viability)
- e. Hubungan masyarakat (public relation)
- f. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil – hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan bukan merupakan satu –satunya sumber informasi untuk pembuatan keputusan, akan tetapi

laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut dipahami oleh pemakai.

4. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

Drebin et al. (1981) mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sector public menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yaitu :

1. Pembayar pajak (tax payers)
2. Pemberi dana bantuan (grantors)
3. Investor
4. Pengguna jasa (fee-paying service recipients)
5. Karyawan atau pegawai
6. Pemasok (vendor)
7. Dewan legislatif
8. Manajemen
9. Pemilih (voters)
10. Badan pengawas (oversight bodies)

Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu : Lembaga pemerintah, Investor dan kreditor, Pemberi sumber daya (resource providers), badan pengawas (oversight bodies) dan Konstituen

Menurut PP 71 tahun 2010 terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman dan Pemerintah

5. Perbedaan Basis Kas Menuju Akruwal dan Basis Akruwal

Tabel 1
Perbandingan Manfaat Basis Kas dan Basis Akruwal

Kriteria	Basis Kas	Basis Akruwal
Pemahaman	Sederhana tapi tidak lazim bagi kebanyakan orang	Kompleks tapi lebih lazim bagi kebanyakan besar orang
Manipulasi	Relatif mudah untuk dimanipulasi	Mudah dimanipulasi, tergantung pada standar akuntansi dan standar audit
Memberikan informasi yang menyeluruh	Hanya informasi terkait dengan kas	Informasi terkait dengan kas dan juga informasi tambahan
Bermanfaat dalam pengelolaan arus kas	Hanya menyediakan informasi dasar	Menyediakan informasi tentang kas dan komitmennya
Pengelolaan aset non-keuangan	Tidak menyediakan informasi tersebut	Menyediakan informasi mengenai aset
Dapat diperbandingkan	Negara-negara pengguna basis kas memiliki format yang berbeda-beda sehingga tidak konsisten dengan negara lain	Negara-negara pengguna basis akruwal menggunakan standar akuntansi yang berbeda-beda sehingga tidak konsisten dengan negara lain
Mengukur keberlanjutan kebijakan fiskal	Sangat terbatas	Bermanfaat, namun harus ditambahkan dengan informasi lain
Kredibilitas	Terbatas	Lebih familiar untuk menilai instansi dan kreditor
Dasar bagi penentuan strategi fiskal	Terbatas	Bagus, jika digunakan dengan informasi mengenai kas
Akuntabilitas	Terbatas	Menyediakan

		informasi tersebut
Dasar bagi penentuan harga barang dan jasa	Terbatas	Bagus
Menghalangi tindakan kecurangan dan korupsi	Terbatas	Lebih bagus daripada basis kas, tergantung pada lingkungan pengendalian dan aspek lainnya
Implementasi	Biaya sistem informasi tinggi	Biaya bisa lebih rendah, namun diperlukan biaya ekstra untuk identifikasi dan penilaian aset dan komponen lain
Keberlanjutan operasi	Skill yang diperlukan rendah, namun diperlukan jumlah personel yang banyak	Mudah untuk dipertahankan dan mengajari operator

Sumber: Athukorala & Reid dalam (Sousa et.al, 2012).

Menurut Mardiasmo (2002), Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut :

1. Basis Kas : $\text{Penerimaan kas} - \text{pengeluaran kas} = \text{Perubahan kas}$
2. Basis Akrual : $\text{Pendapatan (income)} - \text{Biaya} - \text{biaya} = \text{Rugi / laba (Surplus/defisit)}$
3. Pendapatan (Income) : $\text{Penerimaan kas selama satu periode akuntansi} - \text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang}$
4. Biaya : $\text{Kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi} - \text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang}$

Perbedaan Kerangka Konseptual adalah ditambahkannya ketentuan untuk menyusutkan aset tetap (kecuali aset tertentu seperti tanah) dan penjelasan mengenai entitas akuntansi yaitu unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran,

kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan. Perbedaan selanjutnya adalah jumlah laporan basis akrual yang menjadi tujuh laporan dari yang semula empat. Pengakuan belanja pada kerangka konseptual diubah menjadi pengakuan belanja dan beban di mana beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa (basis akrual) dan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah (basis kas). Selanjutnya perbedaan dalam kerangka konseptual adalah unsur-unsur dari tujuh laporan keuangan pokok. Perbedaan pada PSAP 01 adalah ditambahkannya definisi LO dan cara penyajiannya. LO dibahas lebih rinci dalam PSAP 12. Pembahasan tersebut meliputi ruang lingkup, manfaat, periode pelaporan dan struktur pelaporan. Pembahasan tersebut meliputi ruang lingkup, manfaat, periode pelaporan dan struktur pelaporan.

Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (*earned*) atau terjadi (*incured*), tanpa memandang apakah kas sudah di keluarkan atau dikeluarkan.

6. Perdebatan Penggunaan Basis Akrual dalam Pemerintah Daerah

Berikut ini adalah pendapat penelitian-penelitian yang mendukung basis akrual diterapkan pada sektor publik (Hassan, 2013) yaitu (1) basis akrual berhasil digunakan di sektor privat, sehingga basis ini masuk akal jika digunakan di sektor publik. (2) Akuntansi akrual memberikan informasi keuangan yang lebih baik untuk dasar akuntabilitas pemerintah. Laporan keuangan dari akuntansi akrual diyakini lebih komprehensif, sederhana dan mudah dimengerti, sulit untuk dimanipulasi, dan

lebih dapat dibandingkan dan konsisten (Athukorala dan Reid, 2003). (3) Pemerintah akan mampu mengukur kegiatannya misalnya dengan memisahkan antara biaya sekarang dan biaya modal (Athukorala dan Reid, 2003). (4) Adopsi pelaporan akrual akan meningkatkan transparansi, baik transparansi internal maupun eksternal (OECD, 1993). Peningkatan transparansi internal akan mendorong kinerja organisasi, salah satunya melalui pengalokasian sumber daya yang lebih baik. (5) Basis akrual memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi biaya-biaya dari berbagai kegiatan yang dilakukan, sehingga organisasi dapat lebih efisien, mengalokasikan sumber daya lebih baik dan peningkatan kinerja. (6) basis akrual mendukung pengelolaan likuiditas yang lebih baik, memberikan dasar untuk menentukan harga produk dan layanan, dan memberikan informasi untuk mengelola sumber daya.

Selain perbedaan sifat seperti yang dijelaskan sebelumnya, permasalahan pada proses implementasi menyebabkan ada beberapa pihak yang tidak mendukung penggunaan basis akrual untuk organisasi sektor publik. Hassan (2013) merangkum pendapat dari penelitian yang tidak mendukung penggunaan basis akrual yaitu (1) perubahan akuntansi akrual selalu terhubung dengan reformasi sektor publik lainnya sehingga harus dilihat sebagai bagian dari reformasi. (2) Implementasi basis akrual sulit dan mahal. Pelaksanaan akuntansi akrual membutuhkan sistem akuntansi dan teknologi yang rumit. Selain itu, kadang-kadang pemerintah kekurangan personil akuntansi berkualitas yang dapat mengelola sistem. (3) Berbeda dengan klaim *New Public Management* (NPM), dengan menerapkan akuntansi akrual, peran manajerial dan politik dalam lingkungan pemerintahan menjadi kurang jelas. (4) Pelaksanaan akuntansi akrual di sejumlah sektor publik menghasilkan laporan keuangan yang justru membingungkan para penggunanya. (5) Basis akrual, seperti basis

akuntansi lain, masih rentan untuk dimanipulasi (Newberry, 2002). Argumen ini juga tidak menyetujui klaim bahwa basis akrual menawarkan transparansi yang lebih besar. (6) Beberapa bukti penelitian yang menunjukkan bahwa biaya penerapan akuntansi berbasis akrual dan pelaporannya mungkin memiliki biaya yang lebih besar daripada manfaat yang diterima (Jones dan Puglisi, 1997).

7. Hubungan Basis Akuntansi dengan Pengambilan Keputusan Internal

Mardiasmo (2002) Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil – hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan bukan merupakan satu –satunya sumber informasi untuk pembuatan keputusan, akan tetapi laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut dipahami oleh pemakai.

Menurut Salvatore dan Gesso (2013) akuntansi akrual memberikan informasi lengkap tentang aset organisasi publik dan

meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Selain itu, model akuntansi akrual memberikan informasi tentang hasil yang diperoleh (pendapatan dan biaya), yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, untuk lebih mengevaluasi kinerja dan untuk mengukur dampak dari kebijakan publik. Dengan demikian, model ini memungkinkan manajemen untuk membuat pilihan yang lebih rasional dan efisien.

8. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi mengenai Persepsi Manfaat Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah, yaitu :

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yang dilakukan Andriani, et.al (2010) menyatakan dalam penelitiannya di Australia bahwa basis akrual lebih bermanfaat bagi beberapa aktivitas pengambilan keputusan di Pemerintah. Hasil penelitian Sousa, et.al (2012) yang melakukan penelitian tentang manfaat informasi akuntansi yang berbasis akrual pada organisasi sektor publik di Brazil. Secara garis besar para pengguna laporan keuangan dan penyusun laporan keuangan beranggapan bahwa perubahan dari basis kas menjadi basis akrual akan lebih memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan manajemen entitas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nirmala, et.al (2014) menjelaskan bahwa informasi yang dihasilkan basis akrual lebih tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (full costs of operation), dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah. (Guthrie, 1998), berpendapat bahwa akuntansi akrual kurang tepat dan tidak cocok diterapkan dalam

konteks sektor publik karena pada sektor publik, laba bukan merupakan tujuan utama dan laba tidak dapat menjadi ukuran yang relevan dari kinerja; struktur keuangan dan solvabilitas tidak relevan di ranah publik; akuntansi akrual tidak mengukur hasil; dan akuntansi akrual kurang relevan dengan kinerja pelayanan, karena akuntansi akrual hanya berfokus pada biaya layanan dan efisiensi.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan didukung oleh teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

H1: Terdapat Perbedaan Persepsi Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau lebih dari satu (Sugiyono, 2004 :11).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Solok. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kesbangpol Pemerintah Kota Solok jumlah satuan kerja yang terdapat berjumlah 39 SKPD yang terdiri dari, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan inspektorat.

2. Sampel

Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *Total Sampling*. Jumlah SKPD di Kota Padang berjumlah 39 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan inspektorat. Sampel dari penelitian ini adalah mencakup pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD yaitu Kepala SKPD dan tiga orang kepala bidang di masing-masing SKPD, kriteria Kepala dinas dan

Kepala Subbagian adalah menjabat ≥ 3 Tahun.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu level manajer, dikarenakan level manajer merupakan bagian/pegawai yang bertanggungjawab terhadap proses pengambilan keputusan dan terlibat langsung serta memahami kegiatan pada masing-masing bagian di SKPD, dimana terdiri atas Kepala Dinas dan Kepala subbagian pada SKPD. Jumlah responden untuk setiap OPD yang dijadikan sampel 4 (empat) orang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data berupa tanggapan tertulis atas pertanyaan atau kuisisioner dari subjek penelitian pada instansi pemerintah daerah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dari instansi pemerintah daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuisisioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan angket (kuisisioner).

E. Instrumen Penelitian dan Pengukuran Variabel

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Dalam penelitian ini digunakan sebuah kasus yang dirujuk dari artikel Andriani et,al (2010) untuk membantu penelitian ini menggunakan skala likert 1- 5

F. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidak sahnya (tidak valid) suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan

valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut,(Ghozali, 2006:49). Untuk melihat validitas dari data, dilihat dari *Corrected item–Total Correlation*, apabila melebihi nilai r hitung melebihi nilai r tabel maka data dikatakan valid.

1. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel dilakukan uji statistik dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*.

Kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: (Imam, 2005).

- Jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “reliabel”.
- Jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,60$ maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “tidak reliabel”.

G. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dari penelitian yaitu :

1) Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan taraf signifikan 5% (Singgih, 2010). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai Sig $\geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal.
- Jika nilai Sig $< 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

2) Uji Homogenitas

Uji homogenitas yaitu untuk dapat melihat bahwa dua atau lebih kelompok

data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Uji homogenitas dilakukan hanya dengan memilih salah satu statistik kemudian diinterpretasikan, yaitu statistik yang didasarkan pada rata-rata (*Based on Mean*). Jika nilai $\text{sig} < \alpha 0,05$ maka pada varian tidak terdapat Homogenitas.

Jika nilai $\text{sig} > \alpha 0,05$ maka pada varian terdapat Homogenitas.

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan menggambarkan masing-masing variabel dalam bentuk hasil distribusi frekuensi, kemudian dilakukan analisis mean, standar deviasi, tingkat capaian responden dan koefisien serta memberikan interpretasi analisis tersebut.

Menghitung nilai jawaban;

a. Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan.

b. Menghitung rata-rata skor total item dengan menggunakan

$$\text{Rumus: } \frac{5SB + 4S + 3KB + 2TB + 1STB}{15}$$

c. Menghitung nilai rerata jawaban responden, dengan rumus:

$$\text{Mean} = \frac{\sum_{h=1}^n xi}{n}$$

d. Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel. Dengan rumus:

$$\text{TCR} = \frac{R_s}{n} \times 100$$

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria UNP sebagai berikut:

a) Interval jawaban responden 81-100% kategori jawabannya sangat baik

b) Interval jawaban responden 66-80% kategori jawabannya baik

c) Interval jawaban responden 56-65% kategori jawabannya cukup baik

d) Interval jawaban responden 41-55% kategori jawabannya kurang baik

e) Interval jawaban responden < 40% kategori jawabannya tidak baik

2. Metode Analisis

a. Uji Hipotesis (*t-Test*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk melihat nilai signifikan masing-masing parameter yang diestimasi, maka digunakan *t-Test* dengan rumus :

a) Jika $\text{sign} < 0,05$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ nilai $\beta +$, maka hipotesis diterima.

b) Jika $\text{sign} < 0,05$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ nilai $\beta -$, maka hipotesis ditolak.

c) Jika $\text{sign} > 0,05$, $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka hipotesis ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Solok yang berjumlah 39 SKPD. Peneliti menjadikan seluruh populasi sebagai sampel (*total Sampling*) dengan Jumlah responden SKPD di kota Solok sebanyak 156 orang yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan inspektorat. Sampel dari penelitian ini adalah mencakup pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD yaitu Kepala SKPD dan tiga orang kepala bidang di masing-masing SKPD, kriteria Kepala dinas dan Kepala Subbagian adalah menjabat ≥ 3 .

Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 156 kuesioner, yang kembali sebanyak 119 kuesioner. Dan kuesioner yang diisi lengkap yang dapat diolah sebanyak 78 kuesioner atau sebesar 76,28%.

B. Demografi Responden

1. Karakteristik Responden

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebagian besar responden merupakan Perempuan dengan persentase 56,58% atau sebanyak 43 orang, selanjutnya diikuti oleh laki-laki dengan Persentase 43,42% atau sebanyak 33 orang.

b. Berdasarkan Umur

Sebagian besar responden yang berusia 56 - 60 tahun dengan persentase 5,26% atau sebanyak 4 orang, selanjutnya diikuti oleh responden yang berusia 51 - 55 tahun dengan Persentase 15,79% atau sebanyak 12 orang, selanjutnya yang berusia 46 - 50 tahun dengan persentase 15,79% atau sebanyak 12 orang, selanjutnya yang berusia 41 - 45 tahun sebanyak persentase 9,21% atau sebanyak 7 orang, selanjutnya yang berusia 36 - 40 tahun sebanyak persentase 15,79% atau sebanyak 12 orang, selanjutnya yang berusia 31 - 35 tahun sebanyak persentase 28,95% atau sebanyak 22 orang, kemudian yang berusia 25 - 30 tahun sebanyak persentase 59,21% atau sebanyak 7 orang.

c. Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

Pendidikan responden terbanyak adalah Strata 1 (S1) yaitu sebanyak 40 orang atau sebesar 52,63%. Selanjutnya pada tingkat kedua adalah Magister (S2) yaitu sebanyak 20 orang atau sebesar 26,32%, pada tingkat ketiga yaitu D3 sebanyak 11 orang atau 14,47%, dan yang terakhir yaitu SMA sebanyak 5 orang atau sebesar 6,58%.

C. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif Variabel

Manfaat basis akrual dan basis kas menuju akrual berdasarkan kuesioner yang disebar di Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Kota Solok. Jawaban dari responden telah dikelompokkan menjadi dua, yaitu tidak bermanfaat dan bermanfaat. Tidak bermanfaat merepresentasikan jawaban responden yang memilih opsi tidak bermanfaat dan kurang bermanfaat. Bermanfaat merepresentasikan jawaban responden yang memilih opsi bermanfaat dan sangat bermanfaat.

Penyataan (poin 1) Menanyakan basis yang mana lebih bermanfaat dalam menilai kinerja SKPD, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan dengan basis kas menuju akrual untuk menilai kinerja SKPD dengan nilai rata-rata jawaban responden untuk basis akrual 4,88 sedangkan untuk basis kas menuju akrual 3,09 dan untuk pernyataan (poin 2) tentang menilaikinerja program-program yang ada di SKPD, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan dengan basis kas menuju akrual dalam menilai kinerja program di SKPD dengan nilai rata-rata jawaban responden untuk basis akrual 4,84 sedangkan untuk basis kas menuju akrual 3,07. Selanjutnya pernyataan (poin 3) yaitu menilai kinerja pejabat struktural di SKPD, responden juga menjawab basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan dengan basis kas menuju akrual untuk menilai kinerja pejabat struktural di SKPD dengan nilai rata-rata jawaban responden untuk basis akrual 4,76 sedangkan untuk basis kas menuju akrual 2,97. Hal ini sesuai dengan PSAP 12 yang menjelaskan manfaat LO adalah menyediakan mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Hasil ini konsisten dengan penelitian Andriani, et.al (2010) dan penelitian Sousa, et.al (2012).

Pernyataan (poin 4) untuk menilai efektivitas SKPD dalam memberikan pelayanan publik, hasil jawaban responden yang disebar bahwa basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan basis kas menuju akrual dalam menilai efektifitas SKPD, dapat dilihat nilai rata-rata jawaban responden pada tabel diatas untuk basis akrual 4,64 sedangkan untuk basis kas menuju akrual 2,92 dan, pernyataan (poin 5) basis mana yang lebih bermanfaat untuk menilai efisiensi SKPD dalam memberikan layanan publik, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam memberikan layanan publik dibandingkan dengan basis

kas menuju akrual, dengan nilai rata-rata jawaban responden untuk basis akrual 4,62 dan basis kas menuju akrual 2,87. Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani, et.al (2010) dan penelitian Sousa, et.al (2012). Dua penelitian terdahulu sama-sama menjelaskan bahwa dalam hal memperkirakan arus kas instansi, basis kas akan lebih bermanfaat daripada basis akrual.

Pernyataan (poin 6) menanyakan manakah basis yang bermanfaat bagi responden dalam membantu memastikan akuntabilitas SKPD, hasil jawaban responden menjelaskan bahwa basis akrual lebih memberikan informasi yang bermanfaat untuk memastikan akuntabilitas dalam peranan pelaporan keuangan pada kerangka konseptual daripada basis kas menuju akrual dengan persentase rata-rata basis akrual 4,64, basis kas menuju akrual 2,96 selanjutnya (poin 7) membantu memastikan pemenuhan pelaksanaan akuntabilitas SKPD, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam pemenuhan pelaksanaan akuntabilitas dalam peranan pelaporan keuangan pada kerangka konseptual dibandingkan basis kas menuju akrual, responden menjawab dengan nilai rata-rata basis akrual 4,64 dan nilai basis kas menuju akrual 2,91. Pada suatu periode pelaporan setiap entitas memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur. Hal ini konsisten dengan penelitian Andriani, et.al (2010) dan penelitian Sousa, et.al (2012).

Pernyataan (poin 8) basis manakah yang lebih bermanfaat antara basis akrual dan basis kas menuju akrual untuk memprediksi arus kas SKPD dimasa yang akan datang, hasil jawaban responden menunjukkan bahwa basis akrual lebih bermanfaat memprediksi arus kas dimasa yang akan datang daripada basis kas menuju akrual dengan hasil rata-rata basis akrual 4,55, basis kas menuju akrual 3,00

dan pernyataan (poin 9) untuk menilai kemampuan SKPD dalam menghasilkan arus kas, jawaban dari responden bahwa basis akrual lebih bermanfaat dalam menilai kemampuan menghasilkan arus kas dengan nilai rata-rata basis akrual 4,67 sedangkan basis kas menuju akrual 2,96. Selanjutnya pernyataan (poin 10) bagaimana responden menilai basis mana yang bermanfaat sebagai masukan bagi SKPD dalam mempersiapkan anggaran, jawaban responden adalah basis akrual lebih bermanfaat dalam penyiapan anggaran SKPD, dengan nilai rata-rata basis akrual 4,74 dan basis kas menuju akrual 2,97. Sedangkan dua penelitian sebelum ini mengatakan bahwa basis kas yang lebih menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk pertanyaan ini. Standar akuntansi LAK diatur pada PSAP 03. Jika kita membandingkan PSAP 03 yang terdapat pada Lampiran I dan II PP 71 Tahun 2010, maka tidak ada perbedaan manfaat LAK yaitu (1) informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya, (2) LAK juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan dan (3) apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, LAK memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Pernyataan (poin 11) menanyakan basis mana yang bermanfaat sebagai masukan dalam membuat keputusan investasi dalam jumlah besar, hasil responden menjelaskan bahwa basis akrual lebih bermanfaat daripada basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan investasi pemerintah daerah, dengan nilai rata-rata basis akrual 4,64 dan basis kas menuju akrual sebesar 2,93 Jawaban responden tersebut sejalan dengan PSAP 01 paragraf 10, yang menyatakan Laporan

Keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pertanyaan selanjutnya (poin 12) bagaimana responden menilai basis yang lebih bermanfaat sebagai masukan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang dimiliki, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang dimiliki dibandingkan dengan basis kas menuju akrual, hasil jawaban responden berdasarkan nilai rata-rata basis akrual sebesar 4,53 dan basis kas menuju akrual 2,75 dan pernyataan (poin 13) basis mana yang bermanfaat dalam mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya, hasil responden menjelaskan bahwa basis akrual lebih bermanfaat dalam mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya daripada basis kas menuju akrual dengan nilai rata-rata basis akrual 4,74 dan basis kas menuju akrual 3,16. Selanjutnya pernyataan (poin 14) untuk menilai kebutuhan sumber daya SKPD dimasa datang, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam menilai kebutuhan sumber daya SKPD dimasa datang dibandingkan basis kas menuju akrual dengan hasil rata-rata basis akrual 4,74 dan basis kas menuju akrual 3,04

Pernyataan (poin 15) untuk menilai basis mana yang lebih bermanfaat dalam penggunaan sumber daya telah sesuai dengan tujuan SKPD, jawaban pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa basis akrual lebih bermanfaat dalam evaluasi kesesuaian penggunaan sumber daya dengan tujuan SKPD daripada basis kas menuju akrual dengan nilai rata-rata 4,74 dan basis kas menuju akrual 2,89. Responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam pertimbangan keempat situasi di atas, hasil ini konsisten dengan penelitian dari Andriani, et.al (2010) dan

penelitian Sousa, et.al (2012) yang menyatakan bahwa basis akrual lebih bermanfaat untuk pertimbangan tentang sumber daya SKPD.

Pernyataan (poin 16) untuk mengidentifikasi biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik basis manakah yang lebih bermanfaat diperlukan, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat untuk mengidentifikasi biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik dibandingkan dengan basis kas menuju akrual, dengan jumlah nilai rata-rata basis akrual 4,67 dan basis kas menuju akrual 2,80 dan pernyataan (poin 17) untuk melihat basis mana yang bermanfaat dalam menilai kemampuan SKPD untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menilai kemampuan SKPD, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat daripada basis kas menuju akrual dengan nilai rata-rata basis akrual 4,54 dan basis kas menuju akrual 2,83.

Pernyataan (poin 18) sebagai pengukur ketercapaian tujuan dan sasaran SKPD, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran SKPD daripada basis kas menuju akrual dengan jumlah rata-rata basis akrual 4,58 dan basis kas menuju akrual 2,83 selanjutnya (poin 19) untuk menilai basis mana yang bermanfaat dalam kelayakan tujuan dan sasaran SKPD, jawaban responden bahwa basis akrual lebih bermanfaat dalam menilai kelayakan tujuan dan sasaran SKPD dibandingkan basis kas menuju akrual dengan nilai rata-rata basis akrual 4,61 dan basis kas menuju akrual 2,97. Maka hal tersebut konsisten dengan jawaban responden (poin 18 dan 19) tentang bagaimana standar akuntansi dapat menjelaskan kelayakan dan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh OPD. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Andriani, et.al (2010) dan penelitian Sousa, et.al (2012).

Pemeliharaan sistem akuntansi pada tabel.3(lampiran) untuk pertanyaan (point 20) sistem akuntansi akrual untuk tujuan pelaporan penganggaran sebanyak 74(97,36%) menjawab bahwa departemen mereka menjawab iya dan sebanyak 2(2,63%) menjawab tidak untuk tujuan penganggaran. (Poit 21) Sistem akuntansi akrual untuk tujuan pelaporan internal, 69(90,78%) responden menjawab iya dan hanya 7(9,21%) responden menjawab bahwa sistem akuntansi akrual tidak untuk tujuan pelaporan internal. Pertanyaan (point 22) apakah sistem akuntansi kas menuju akrual untuk tujuan penganggaran, 33(43,42%) responden menjawab iya dan 43(55,26%) responden menjawab tidak untuk sistem akuntansi kas menuju akrual untuk tujuan penganggaran. Sistem akuntansi kas menuju akrual untuk tujuan pelaporan internal (pertanyaan 23) sebanyak 39(51,31%) responden menjawab iya dan 27(48,68%) responden menjawab bahwa sistem akuntansi kas menuju akrual tidak untuk tujuan pelaporan internal.

Jika dilihat dari pemaparan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa dari seluruh pertanyaan yang diajukan ke responden dengan menggunakan sistem akuntansi basis akrual dirasakan lebih tepat dalam tujuan penganggaran sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani, et.al (2010), pada penelitian ini sistem akuntansi kas menuju akrual disarankan lebih tepat dalam pelaporan internal perusahaan.

2. Menghitung nilai jawaban

a. Basis Kas Menuju Akrual

Frekuensi Basis Kas Menuju Akrual dapat dilihat bahwa responden tertinggi berada pada pernyataan nomor13, yaitu 63,16% dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai bahwa manfaat yang diperoleh dari basis kas menuju akrual paling tinggi terdapat pada item pernyataan nomor 13. Sedangkan untuk tingkat capaian responden terendah berada pada pernyataan nomor 12, yaitu

sebesar 55% dengan kategori baik. Untuk rata-rata tingkat capaian responden pada basis kas menuju akrual adalah sebesar 58,68%dengan kategori baik.

b. Basis Akrual

Frekuensi Basis Akrual dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi berada pada pernyataan nomor 1, yaitu 97,63% dengan kategori Sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai bahwa manfaat yang diperoleh dari basis akrual paling tinggi terdapat pada item pernyataan nomor 1. Sedangkan untuk tingkat capaian responden terendah berada pada pernyataan nomor 12, yaitu sebesar 90,53% dengan kategori Sangat baik. Untuk rata-rata tingkat capaian responden pada basis kas menuju akrual adalah sebesar 93,44%dengan kategori Sangat baik.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuisioner digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hit} > r_{tabel}$, maka dikatakan valid. r_{tabel} untuk $n=98$ adalah 0,1966.

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrument .Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pernyataan adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Hasil menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach Alpha* yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuisioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas padadata Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual bahwa diketahui bahwa Sig

sebesar 0,511 .Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

2. Uji Homogenitas

Hasil uji homogenitas diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig) dari data Basis AkruaI dan Basis Kas Menuju AkruaI sebesar 0.84 dapat disimpulkan bahwa Basis AkruaI dan Basis Kas Menuju AkruaI dikatakan homogen karena sig $> 0,05$

3. Uji Hipotesis

Berdasarkan ringkasan hasil pengujian SPSS diketahui nilai Sig $<$ Alpha sebesar 0.00. Hipotesis dapat diterima jika nilai Sig lebih kecil dibandingkan alpha 0.05. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Basis AkruaI dan Basis Kas Menuju AkruaI terdapat perbedaan dalam pengambilan keputusan Internal Pemerintah Daerah, Dengan demikian hipotesis pertama (H) **diterima.**

E. Pembahasan Hipotesis

1. Terdapat Perbedaan Persepsi Manfaat basis akruaI dan basis kas menuju akruaI dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengolahan pengujian tersebut, diketahui nilai Sig $<$ Alpha sebesar 0.00. Hipotesis dapat diterima jika nilai Sig lebih kecil dibandingkan alpha 0.05. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Basis AkruaI dan Basis Kas Menuju AkruaI terdapat perbedaan dalam pengambilan keputusan Internal Pemerintah Daerah, Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nirmala, et.al (2014) menyebutkan bahwa perubahan basis akuntansi sektor publik dari basis kas menuju akruaI menjadi basis akruaI disebabkan oleh kelemahan basis kas dalam menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan. Nirmala, et.al (2014) juga menjelaskan bahwa

informasi yang dihasilkan basis akruaI lebih tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (*full costs of operation*), dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah.

Andriani, et.al (2010) menyatakan dalam penelitiannya di Australia bahwa basis akruaI lebih bermanfaat bagi beberapa aktivitas pengambilan keputusan di Pemerintah. Hasil penelitian Andriani, et.al (2010) dikuatkan lagi oleh penelitian Sousa, et.al (2012) yang melakukan penelitian secara garis besar para pengguna laporan keuangan dan penyusun laporan keuangan beranggapan bahwa perubahan dari basis kas menjadi basis akruaI akan lebih memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan manajemen entitas.

Penerapan akuntansi berbasis akruaI diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan basis akuntansi *cash toward accrual*. Manfaat bagi pemerintah daerah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Manfaat bagi masyarakat pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas serta pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya pemerintah daerah.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan terdapat perbedaan basis akruaI dan basis kas menuju akruaI dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah kota Solok dan basis akruaI lebih bermanfaat dibandingkan basis kas menuju akruaI

dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah kota Padang

A. KETERBATASAN PENELITIAN

1. Keterbatasan penelitian ini yaitu kuisisioner yang diberikan kepada responden menggunakan kuisisioner tertutup yaitu dimana kuisisioner yang menyajikan pertanyaan pertanyaan dan pilihan jawaban, sehingga responden hanya dapat memberikan tanggapan terbatas pada pilihan yang diberikan.
2. Meskipun peneliti sudah memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai petunjuk pengisian dan maksud dari setiap pertanyaan yang diajukan peneliti kurang dapat mengendalikan jawaban dari responden, baik berupa pemahaman responden atas setiap item pertanyaan serta verifikasi setiap jawaban dari responden sehingga dimungkinkan terjadinya bias dalam pengambilan kesimpulan penelitian.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus dengan jumlah responden yang lebih sedikit (misalnya 5 SKPD dalam 1 Pemerintah Daerah) sehingga peneliti dapat mendampingi responden dalam pengisian kuisisioner nya

DAFTAR PUSTAKA

Andriani,dkk. 2010. Decision Usefulness of Cash and Accrual Information: PublicSector Managers' Perceptions. *Review No. 53 Vol. 20*

Athukorala, S. L., & Reid, B. (2003), Accrual budgeting and accounting in government and its relevance for developing member countries. Manila: Asian Development Bank

BPK-RI, 2015, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Tiga Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat, <http://padang.bpk.go.id/?p=5141> diakses 20/4/2017

Carlin, T. M., 2005, Debating the impact of accrual accounting and reporting in the public sector, *Financial Accountability & Management, Vol. 21 No. 3.*

Deloitte Public Sector Paper, 2004. Mastering the Transformation: New Public Management, Accrual Accounting, and Budgeting

Erlina,dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan : Salemba Empat

Ferryono dan Sutaryo. 2016. Manfaat Basis Akrua dan Basis Kas Menuju Akrua dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*

Halim dan Muhammad syam kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah (edisi 4)*. Yogyakarta : Salemba Empat

International Federation of Accountants (IFAC), 2003. Study 14, Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (Second Edition).

_____,1994. Occasional Paper 1, Implementing Accrual Accounting in Government: The New Zealand Experience.

- _____, 2014. IFAC handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements Vol. 1. IFAC Publications.
- Kementrian Keuangan, 2014. Modul Penerapan Akuntansi Berbasis akrual. <http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual>. diakses tanggal 17 Maret 2017
- Khan, A., Mayes, S., 2009. Transition To Accrual Accounting. International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department.
- Khubiati Ani dan Johan Arifin. 2016. Analisis Pengaruh Faktor Institusional Terhadap Minat Adopsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*
- Laughlin, R. (2012). Debate: Accrual Accounting: Information For Accountability Or Decision Usefulness? Public Money & Management.
- Mardiasmo.2002.*Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta : Penerbit Andi
- OECD, 1993. Accounting for what? The value of Accrual Accounting in the Public Sector, Occasional Papers on Public Management.
- _____, 2010. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Putra, I Wayan G. Y. D., dan Ariyanto D., 2015, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAP Berbasis Akrual. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015): 14-32 ISSN: 2302-8556*
- PP 71 tahun 2010.2012.*Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat
- Sousa, R. G., Vasconcelos, A. F., Caneca., R. L., Niyama, J. K., 2012, Accrual Basis Accounting in the Brazilian Public Sector: Empirical Research on the Usefulness of Accounting Information. *Paper presented at the 12th USP Congress of Controllershship and Accounting, São Paulo, July 2012.*
- Sri Rahayu. 2005. *SPSS Versi 12.00 dalam Riset Pemasaran*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendro,dkk. Resistensi Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Suwardjono, 2013. Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan.BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Thomas H. Beechy, 2007. Does Full Accrual Accounting Enhance Accountability? *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 12(3), 2007, article 4.*
- Tudor, A., T., & Mutiu, A., 2006.Cash Versus Accrual Accounting In Public Sector. Faculty of Economics and Business Administration, Babes Bolyai University, <http://www.ssrn.com>.
- Wahyuni Nina Eka dan Helmy Adam. 2016. Analisis Implementasi Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Perspektif Teori Institutional: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*

Widayat dan Agung Nur ProboHudono. 2016. Determinan Kesiapan Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.*